

# PEMIKIRAN HATTA TENTANG DEMOKRASI, KEBANGSAAN DAN HAK AZASI MANUSIA

Oleh: Aman<sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Kajian historis-filosofis ini dimaksudkan untuk mengungkap secara bermakna pemikiran Hatta tentang demokrasi, kebangsaan, keadilan sosial, dan hak azasi manusia. Adapun wilayah kajian dari pembahasan ini adalah mengungkap latar belakang pribadi Hatta sampai kiprahnya dalam panggung kekuasaan. Memang tidak dapat disangsikan lagi bahwa Hatta adalah seorang demokrat sejati dimana dalam jiwanya mengalir ruh Timur dan juga ruh kemanusiaan. Pendidikan Barat yang diperolehnya tidak melunturkan jiwa ke-Timurannya yang selama ini menyatu dalam dirinya. Bahkan dengan belajar di Barat Hatta semakin ideal, karena selain pemikirannya yang dilandasi oleh ruh ke-Timuran, tetapi juga dipengaruhi oleh sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme. Pemikiran-pemikirannya yang spektakuler tentang berbagai hal inilah yang akan menjadi wilayah analisis dalam pembahasan ini.*

*Hasil dari pembahasan ini dimaksudkan untuk menjadikan referensi bagi para pembaca dalam mengkaji pemikiran seorang tokoh nasional. Hasil analisisnya dimaksudkan untuk mendorong berbagai kalangan agar semakin tertantang dalam menyampaikan paradigmanya dalam menilai atau mengkritisi suatu filosofis seseorang ataupun peristiwa sejarah yang menyertainya. Di samping itu, keteladanan seorang Hatta diharapkan dapat dijadikan tauladan untuk bertindak secara bijaksana, terutama dalam mengambil segala tindakan dan keputusan baik secara makro maupun mikro. Akan lebih baik jika diawali oleh analisis singkat ini dapat mengundang berbagai kalangan untuk kembali mengkaji betapa pentingnya peranan tokoh nasional Hatta untuk bangsa ini. Hasil pemikirannya telah banyak menjiwai konstitusi republik ini yang sampai sekarang masih sangat relevan untuk dijadikan sebagai ruh konstitusi.*

*Kata Kunci: Hatta, Demokrat, Hak Azasi, Keadilan Sosial dan Kebangsaan.*

## A. Pendahuluan

Jika ada pemimpin Indonesia yang hampir sempurna dalam karakter dan integritas pribadi, maka Mohammad Hatta (Hatta) adalah salah satu yang paling menonjol. Wawasan intelektualnya sangat jauh ke depan, sementara moral politiknya yang prima dan anggun banyak diakui kawan dan lawan. Dalam suasana sengketa politik dengan Bung Karno, komunikasi persaudaraan antara keduanya tidak pernah

---

<sup>1</sup> Pengajar pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNY.

putus, walaupun watak keras Hatta dalam politik tersebut sempat mengecewakan generasi muda karena kegagalannya dalam membujuk Hatta agar jangan meninggalkan kursi wakil presiden.<sup>2</sup>

Jaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945) bagi Mohammad Hatta, merupakan sebuah ujian besar, yang hanya dapat diatasinya karena keteguhan iman dan optimismenya akan tercapainya cita-cita Indonesia merdeka. Dalam pada itu beliau mempunyai keyakinan bahwa Perang Pasifik akan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Hatta tidak percaya bahwa Jepang akan menang dengan Amerika/Sekutu yang mempunyai *productie-potential* begitu hebat. Tetapi berhubung dengan keuntungan permulaan yang diperoleh Jepang, perang tidak akan bisa selesai dalam tiga tahun. Masa perang itu bagi Hatta harus dipergunakan untuk mempersiapkan tenaga perjuangan rakyat, yang nantinya sanggup memikul kemerdekaan apabila Jepang sudah kalah.<sup>3</sup> Kalau tidak bisa dielakkan maka kerjasama dengan pemerintah militer Jepang itu, menurut pertimbangan Hatta, bisa berarti untuk meringankan banyak sedikitnya penderitaan yang ditimpakan pemerintah militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Selama pendudukan Jepang, Hatta jarang berbicara di depan umum, walaupun berbicara lebih sering sekedar memberikan obat pelipur lara dalam jiwa rakyat yang sedang tertekan.

Ketika Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945, maka meletuslah amarah orang-orang Indonesia terhadap Jepang, dan timbulah dorongan aktif untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Pandangan Hatta yang jauh ke depan mengatakan pendiriannya bahwa Jepang yang kalah tidak menjadi soal lagi. Soal yang paling penting adalah menghadapi tentara Sekutu yang akan mengembalikan kekuasaan Pemerintah Belanda di Indonesia. Oleh sebab itulah Hatta menyusun siasat antara perang dan damai untuk mencapai pengakuan Indonesia merdeka. Kemudian Hatta

---

<sup>2</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Demokrasi dan Nasionalisme: Pengalaman Indonesia*. Yogyakarta: FPIPS IKIP Yogyakarta, 1996. Sikap Hatta untuk memilih mundur pada tanggal 1 Desember 1956 dari kursi wakil presiden lebih diakibatkan oleh sikap otoriter Bung Karno dalam hal menerapkan kebijakan politik. Pemikiran-pemikiran Hatta yang visioner jauh ke depan tidak sejalan dengan pemikiran Bung Karno. Dengan demikian maka Dwi Tunggal Soekarno-Hatta telah menjadi Dwi-Tunggal yang menyebabkan kekecewaan banyak orang. Lihat juga Ahmad Syafii Maarif, *Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Perpustakaan Yayasan Hatta, 1999, p.1.

<sup>3</sup> Mohammad Hatta, *Portrait of a Patriot*. Alih bahasa Deliar Noer, The Hauge Paris: Mouton Publisher, 1972. Lihat pula Hatta, *Kumpulan Karangan Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1953, p.19.

memilih damai. Akan tetapi seperti seringkali diucapkannya “kita cinta perdamaian, akan tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan<sup>4</sup>

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno dan Mohammad Hatta, di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.<sup>5</sup> Semenjak itu Hatta berperan aktif memimpin negara RI sebagai wakil presiden., dan dalam keadaan yang sangat sulit Hatta harus merangkap sebagai Perdana Menteri tahun 1948-1949. Politik yang diperjuangkannya akhirnya mencapai tujuan dengan diakuinya Indonesia sebagai negara berdaulat yang terdiri atas bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda pada Konferensi Meja Bundar tahun 1950. Pada waktu Republik Indonesia Serikat berdiri, Hatta yang menjadi Perdana Menteri pertama dan terakhir. Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk sesuai amanat proklamasi, Hatta terpilih sebagai wakil presiden oleh parlemen.<sup>6</sup> Beranjak dari kenyataan di atas, tulisan ini bertujuan menganalisis pemikiran Hatta tentang Demokrasi, Kebangsaan dan Hak Asasi Manusia.

## **B. Hatta: Integretor Warisan Timur dan Barat**

Warisan Timur yang menyatu dalam pribadi Hatta adalah nilai budaya Minangkabau yang egaliter dan nilai Islam modern. Nilai ini diintegrasikan dengan nilai-nilai Barat berupa nasionalisme dan demokrasi sebagai ilham untuk menegakan hak asasi manusia, sebuah obsesi Hatta yang belum terwujud sampai hari ini. Berikut akan dibahas tentang Riwayat Hidup dan Latar belakang Pendidikan Mohammad Hatta.

### **1. Riwayat Hidup Mohammad Hatta**

Hatta lahir tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi Sumatera Barat.<sup>7</sup> Nama aslinya ‘Mohammad Athar’ yang artinya minyak wangi, Hatta lahir dari pasangan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, p. 18. Strategi Hatta untuk berhati-hati berhadapan dengan Jepang bukan berarti Hatta bersikap konservatif, melainkan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam menggapai kemerdekaan mengingat kondisi bangsa yang belum mampu untuk melancarkan tindakan-tindakan yang mengarah pada kondisi yang destruktif akibat tindakan tentara Jepang.

<sup>5</sup> A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I*. Bandung: Disjarah Angkatan darat dan Angkasa, 1977, p.208.

<sup>6</sup> Hatta, *op.cit.*, p.20.

<sup>7</sup> Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1990, p.15.

Haji Mohammad Djamil dan Siti Saleha yang merupakan keluarga cukup terpadang di Bukittinggi Sumatera Barat<sup>8</sup>

Garis keturunan dari ayahnya merupakan keluarga ulama, sedangkan ibunya merupakan keturunan saudagar. Dari dua garis keturunan tersebut telah memberikan dua bakat pada dirinya. Dia intelek religius, yang mempunyai visi ekonomi dan ketegaran luar biasa, sehingga sanggup menghadapi segala penderitaan dan cobaan dengan jiwa tenang dan penuh kesabaran. Di matanya, rencana kemakmuran rakyat di masa mendatang harus berdasar kepada teori yang dipikirkan sematang-matangnya dengan pelaksanaan yang sinkron pada ruang dan waktu.

Kiprahnya dalam perjuangan kemerdekaan dimulai sejak menjadi anggota Jong Sumateranen Bond (JSB), kemudian Perhimpunan Indonesia (PI), lalu Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru). Dalam menghadapi sistem kolonialisme dan imperialisme Belanda Hatta menerapkan prinsip non-kooperasi secara konsisten. Dalam memimpin organisasi pergerakan kebangsaan terutama PI dan PNI-Baru, Hatta membina organisasi tersebut menjadi partai kader dengan menerapkan pendidikan politik yang intensif. Setelah merdeka, kebijakan Hatta dengan ditandatanganinya Maklumat No X, Maklumat 1 Nopember, Maklumat 3 Nopember 1945, telah mengubah sistem pemerintahan Indonesia dan Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet Parlementer yang merupakan jalan ke arah pemerintahan yang demokratis.

Pengunduran diri Bung Hatta pada tanggal 1 Desember 1956 merupakan fenomena ironis dalam sejarah kepemimpinan bangsa Indonesia. Perbedaan pandangan politiknya dengan presiden Sukarno yang sudah tidak bisa diselaraskan lagi, ditambah situasi politik yang kacau, sementara ia tidak memiliki kekuasaan untuk mengatasi semua itu, membuatnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sebuah keteguhan memegang prinsip yang jarang terjadi pada kepemimpinan-kepemimpinan setelahnya.

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang diperjuangkan selama hidupnya. Hal ini tercermin dalam banyak karya ilmiahnya, seperti terlihat dalam usahanya

---

<sup>8</sup> Soebagiyo I.N., Bung Hatta Kita, dalam Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70, *Bung Hatta Mengabdikan pada Cita-cita Perjuangan Bangsa*, 1972, p.1.

membela hak-hak rakyat melalui berbagai tulisan sejak aktif di PI. Langkah Bung Hatta itu bisa dikatakan sebagai wujud dari pembelaannya terhadap hak-hak asasi manusia.

## **2. Latar Belakang Pendidikan Bung Hatta**

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan keluarga Hatta tentang rencana pendidikannya. Kakek dari pihak ibu menghendaki agar Hatta belajar di sekolah biasa, mendapatkan pelajaran-pelajaran umum. Sedangkan dari pihak ayah menghendaki agar kelak Bung Hatta dapat menempuh pendidikan di Kairo Mesir. Pendidikan Bung Hatta amat dipengaruhi bahkan merupakan masalah yang ditangani oleh keluarganya secara serius. Dalam prosesnya kemudian ternyata keluarga dari pihak ibu yang kemudian menentukan pilihan pendidikan Hatta.

Hatta masuk Sekolah Rakyat di Bukittinggi hanya selama 2 tahun. Selain sekolah umum, pendidikan agama pun tetap diajarkan, baik mengenai membaca Al-Qur'an, tauhid, maupun aqidah. Atas dorongan Tuan Jansen, guru privat bahasa Belanda, Bung Hatta kemudian pindah ke ELS (*Europese Large School*) dan duduk di kelas II. Dari Bukittinggi akhirnya pada tahun 1913 pindah ke Padang untuk meneruskan ELS mulai kelas V. Di ELS ini selain Bahasa Belanda diajarkan pula Bahasa Perancis yang kemudian amat membantunya ketika ia meneruskan studinya di Belanda.<sup>9</sup>

Studinya ke ELS Padang diselesaikan pada tahun 1917, kemudian masuk ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) yang diselesaikannya pada tahun 1919. Sejak di MULO inilah Bung Hatta mulai aktif di JSB (Jong Sumateranen Bond). Selama itu Hatta sering menghadiri ceramah-ceramah politik yang diadakan oleh tokoh-tokoh lokal seperti Sutan Said Ali, seorang guru sekolah Abadiyah yang kemudian dibuang ke Digul. Selain itu juga ceramah-ceramah Abdul Moeis dan Sarekat Islam yang sering berkunjung ke Minangkabau. Setelah lulus dari MULO tahun 1919, Hatta dapat mewujudkan rencananya yang dulu gagal yakni melanjutkan studi ke Jakarta (Batavia). Di Jakarta ia masuk ke PHS (Prins Hendrik School) tahun 1919-1921 yang dipergunakan oleh Bung Hatta untuk meningkatkan diri dalam

---

<sup>9</sup> Soebagyo, *op.cit.*, p.3.

pengenalan seluk beluk masyarakat jajahan pada tingkat nasional.<sup>10</sup> Studinya di PHS selesai 1921, kemudian Hatta meneruskan studi ke Belanda, masuk Handels Hooge School (Sekolah Tinggi Ekonomi) Refterdam. Selama di Belanda inilah Bung Hatta memegang peranan vital dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Masuknya Bung Hatta ke dalam perhimpunan Indonesia menjadikan organisasi ini semakin kuat pengaruhnya dan semakin radikal.

Karena kesibukannya mengurus PI studi Bung Hatta menjadi terbengkalai. Selain mendalami ilmu ekonomi, ia juga mendalami ilmu hukum, seperti yang diceritakan Aboetari kawan Bung Hatta di Nederlandsche Handels Hoogeschool (NHH) bahwa ketika pelajaran Aboetari menuju ke akuntansi, pelajaran Bung Hatta menuju ke ilmu kenegaraan, *Staatsberg Staatkunde*.<sup>11</sup> Fakultas kenegaraan pada NHH merupakan fakultas yang baru dibuka kira-kira tahun 1922. Dengan begitu merupakan keuntungan besar bagi Bung Hatta karena hal tersebut sesuai dengan keinginannya. Pelajaran baru yang diikutinya ini memberikan landasan kuat pada pemikirannya tentang politik.

Studinya di Belanda selesai bulan Juli 1932. Kira-kira sebelas tahun lamanya Bung Hatta di Belanda, selain berhasil dalam studi Bung Hatta juga berhasil menjadi sosok pemimpin yang berkualitas baik dalam keilmuan maupun organisasi pergerakan kemerdekaan. Pemikiran politiknya yang anggun dan cemerlang sering mendapat predikat integretor warisan Timur dan Barat.

### **C. Pemikiran Hatta tentang Demokrasi**

Cita-cita tentang keadilan sosial adalah sari pati dari nilai-nilai timur dan barat yang mengkristal dan membentuk visi Hatta mengenai masalah-masalah politik kenegaraan. Hatta sangat percaya bahwa demokrasi adalah hari depan sistem politik Indonesia. Kepercayaan yang mendalam kepada prinsip demokrasi inilah yang pernah menempatkan Hatta pada posisi yang berseberangan dengan Bung Karno ketika masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Hatta menilai sistem ini sebagai sistem otoriterian yang menindas demokrasi. Sekalipun pendapatnya berbenturan dengan

---

<sup>10</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, p.25.

<sup>11</sup> Moh. Hatta, *Demokrasi Kita*. Jakarta: Idayu Press, 1966, p.24.

Bung Karno, Hatta tetap saja memberikan *fair chance* kepada presiden untuk membuktikan dalam realitas.

Sekalipun tertindas, di mata Hatta demokrasi tidak akan pernah lenyap dari bumi Indonesia.<sup>12</sup> Menurut Hatta ada tiga sumber pokok demokrasi yang mengakar di Indonesia. *Pertama*, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme, sementara prinsi-prinsip ini dinilai juga sekaligus sebagai sebagai tujuan. *Kedua*, ajaran Islam memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. *Ketiga*, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa wilayah Indonesia. Ketiga sumber inilah yang akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia.<sup>13</sup> Baginya, suatu kombinasi organik antara tiga sumber kekuatan yang bercorak sosio religius inilah yang memberi keyakinan kepada Hatta bahwa demokrasi telah lama berakar di Indonesia tidak terkecuali di desa-desa. Bila di desa yang menjadi tempat tinggal sekitar 70% rakyat Indonesia masih mampu bertahan, maka siapakah yang meragukan hari depan demokrasi di Indonesia.<sup>14</sup>

Tetapi memang sia-sia, sistem feodal sering mengganjal perkembangan demokrasi di Indonesia pada berbagai periode sejarah Indonesia modern. Periode demokrasi terpimpin dan periode demokrasi Pancasila (Orde Baru) sama-sama ditandai oleh berlakunya sistem politik otoriterian dengan topangan subkultur neofeodalisme. Hatta sangat prihatin melihat perkembangan politik yang tidak sehat, tetapi regim menciptakan kedua sistem tersebut tidak mau ‘mendengar’ nasehat Hatta. Akhirnya mereka hancur lewat cara yang destruktif. Sebelum wafat (14 Maret 1980), Hatta tampaknya sangat kecewa melihat perkembangan politik yang semakin lepas kendali. Dalam kesempatan lain Bung Hatta mengatakan telah lama makan hati melihat keadaan yang menjauhkan bangsa bagi terwujudnya keutuhan Bangsa. Kasus korupsi dalam tubuh Pertamina awal tahun 1970-an yang dibongkar Mochtar Lubis melalui koran Indonesia Raya sangat menyakitkan Hatta. Lubis menulis “Betapa Hati

---

<sup>12</sup> Moh. Hatta, *Kumpulan Pidato II*. Jakarta: Idayu Press, 1983, p.106.

<sup>13</sup> A. Syafii Maarif, 1999, *op.cit*, p.2.

<sup>14</sup> Moh. Hatta, 1983, *op.cit*, p.13.

Bung Hatta amat Gundah Melihat Perkembangan yang terjadi di Pertamina, dan dengan Kasus Korupsi lainnya di tanah air”.<sup>15</sup>

#### **D. Pandangan Hatta Tentang Keadilan Sosial**

Pemikiran Bung Hatta yang sangat komprehensif tentang keadilan sosial dapat dilihat dan ditelusuri pada saat ia berbicara tentang Pancasila, suatu dasar yang dibelanya secara sungguh-sungguh baik dalam teori maupun praktek. Bagi Hatta sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pembimbing bagi cita-cita kenegaraan di Indonesia. Prinsip spiritual dan etik ini memberikan bimbingan kepada semua pihak yang baik bagi rakyat dan bangsa. Sejalan dengan prinsip dasar ini, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dari sila pertama dalam praktik. Begitu pula sila ketiga dan keempat. Sedangkan sila kelima, “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menjadi tujuan terakhir dari ideologi Pancasila.<sup>16</sup> Hatta juga menegaskan bahwa di bawah bimbingan sila pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kelima sila itu saling mengikat.<sup>17</sup> Dalam praktik politik Indonesia selama hampir 40 tahun, gagasan-gagasan besar dan otentik dari Hatta itu telah dilecehkan oleh sebagian besar elit politik Indonesia, hingga jadilah bangsa Indonesia seperti sekarang ini, penuh ketidakpastian politik dan ekonomi, sementara utang luar negeri sudah semakin menggunung.

Semakin kita perdalam gagasan Bung Hatta tentang berbagai masalah mendasar yang dihadapi bangsa ini, kadang-kadang terasa suasana hati ini semakin ciut dan hambar, apakah kita pada akhirnya mampu mengurus kemerdekaan ini. Selama hampir empat dekade elite politik kita telah “menipu” bangsa ini, sebuah tipuan yang dibungkus dalam retorika politik yang tidak jujur. Keserakahan terhadap kekuasaan telah mematikan sebagian nurani sebagian kita. Pada sisi lain yang juga sangat menyedihkan adalah kenyataan bahwa memori kolektif kita sering tidak berfungsi untuk belajar dari masa lampau, hingga tipuan politik sering dianggap

---

<sup>15</sup> Mochtar Lubis, “Bung Hatta Manusia Berdisiplin”, dalam Mutia Farida Swasono (ed), *Bung Hatta Pribadinya Dalam Kenangan*. Jakarta: Sinar Harapan dan Universitas Indonesia, 1980, p.582.

<sup>16</sup> A. Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1987, p.155.

<sup>17</sup> Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press, 1977, p.20.



sebagai sebuah kebenaran. Hasil pemilu 1999 adalah di antara bukti-bukti tentang betapa mudahnya rakyat ditipu. Untunglah Bung Hatta tidak menyaksikan lagi semua drama dan akrobat politik yang memuakkan ini.

Namun dalam perspektif Bung Hatta, orang tidak boleh larut dalam kehambaran, sebab sebuah bangunan demokrasi yang sehat pasti akan terwujud asalkan kita punya tekad untuk memperjuangkannya. Hatta adalah sosok pemimpin yang tidak pernah takut berhadapan dengan situasi terburuk sekalipun. Hatta pada dasarnya adalah seorang demokrat yang cinta damai dalam memperjuangkan perubahan. Tetapi bila jalan buntu, kekerasanpun bukanlah halangan demi mencapai kebenaran dan keadilan, seperti pada masa revolusi. Hatta menyampaikan pidatonya sebagai ketua Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda pada tanggal 17 Januari 1926, pada waktu usianya menginjak 24 tahun,

“Aku telah menyebutkan bahwa imperialisme Barat harus disudahi untuk kepentingan kemanusiaan dan setiap bangsa yang terjajah mempunyai kewajiban untuk memerdekakan diri. Dan karena itu Indonesia harus mencapai kemerdekaannya atas dasar kemanusiaan dan peradaban. Dan aku kuatir bahwa satu-satunya jalan untuk melaksanakan itu ... tidak lain kekerasan”<sup>18</sup>

Pada waktu pidato itu disampaikan, penjajahan itu asing atau Barat sifatnya. Bung Hatta memang belum pernah mengatakan bahwa penjajahan itu dapat juga berasal dari kalangan bangsa sendiri, tergantung pada substansinya. Dalam perspektif ini tidaklah salah untuk berkata bahwa penjajahan itu dapat saja bersifat domestik bila di sana terdapat substansinya berupa dominasi, eksploitasi, dan diskriminasi penguasa terhadap rakyat atau golongan atas golongan yang lain. Jadi redefinisi tentang hakekat penjajahan itu, jika kita memang ingin melihat bangsa kita menjadi bangsa yang benar-benar merdeka secara keseluruhan, perlu kita sosialisasikan. Bila tidak demikian, kemerdekaan itu pada akhirnya hanyalah menjadi milik sekelompok kecil manusia. Hatta ingin agar kemerdekaan itu menjadi milik semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan latar belakang sejarah. Dengan demikian nasionalisme Indonesia jika ingin difungsikan dalam kenyataan tidak harus ditujukan untuk

---

<sup>18</sup> Mohammad hatta, *Momoir*. Jakarta: Tintamas, 1978, p.195.

melawan eksploitasi dan dominasi asing dalam politik, ekonomi, dan budaya, tetapi juga harus dihadapkan kepada unsur kolonial domestik.

#### **E. Pandangan Hatta tentang Kebangsaan**

Dalam menentukan kriteria tentang bangsa dan kebangsaan, bukanlah suatu paradigma yang mudah. Bung Hatta sendiri tidak sependapat dengan teori geopolitik. Bangsa dan kebangsaan tidak bisa diambil dari kriteria persamaan asal, persamaan bahasa dan persamaan agama. Sementara geopolitik memandang masalah kekuatan nasional semata-mata dalam istilah geografi dan di dalam proses, merosot menjadi metafisika politis yang diutarakan dalam jargon yang tidak berdasar ilmu pengetahuan.<sup>19</sup>

Dalam memandang masalah kebangsaan, Hatta menunjuk teori-teori Sarjana Barat Ernest Renan, Otto Bauer dan Lothrop Stoddard. Hatta menegaskan keyakinannya bahwa bangsa ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan yang bertambah besar oleh karena seperuntungan, malang yang sama diterima, mujur yang sama didapat, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak.<sup>20</sup>

Menurut Hatta bahwa batas negara yang akan dibentuk hanya mencakup wilayah Hindia Belanda saja. Ia menolak pikiran Mohammad Yamin yang mendasarkan keperluan strategi perang dan pertahanan serta kegunaan.<sup>21</sup> Pendapat Yamin dikhawatirkan Hatta akan memberi kesan imperialisme yang selama ini mereka tentang habis-habisan. Bahkan Hatta berpendapat bahwa bila Papua (Irian Barat) karena suatu hal tidak bersedia masuk juga bukan merupakan problem. Demikian juga halnya, apabila rakyat Malaka dan Borneo Utara mau bergabung dengan Indonesia, sebagai hak mereka. Yang terpenting menurut Hatta, janganlah ada pemaksaan untuk bergabung dengan negara yang akan dibentuk, sebab wilayah bekas jajahan Hindia Belanda untuk negara baru sudah cukup luas.

---

<sup>19</sup> Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa Edisi ke-6*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990, p.242.

<sup>20</sup> Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, *op.cit.*, p.15.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Tentang masalah kebangsaan, Bung Hatta memandang ada bermacam-macam rupa dan golongan yang memajukannya. Pada masa pergerakan, setidaknya Bung Hatta melihat ada tiga macam rasa kebangsaan, yaitu kebangsaan *cap ningrat*, *kebangsaan cap intelek* dan *kebangsaan cap rakyat*.<sup>22</sup> Rasa kebangsaan yang dimiliki kaum ningrat merupakan golongan pemerintah yang sejak jaman penjajahan berharap, jika Indonesia merdeka merasa dalam hati bahwa kekuasaan akan berpindah ke tangan mereka. Mereka merasa dalam hati bahwa mereka mempunyai hak mendasar riwayat alias *historisch Recht* atas pemerintahan Indonesia. Bagi kaum ningrat, kembalinya kejayaan Majapahit ke atas alam Indonesia senantiasa menjadi obsesi. Dalam situasi kebangsaan seperti ini rakyat menempati posisi marjinal.

Bagi kaum intelek, terpelajar, dan cerdas pandai, kekuasaan haruslah berada di tangan mereka. Bila kemerdekaan tercapai, karena mereka memiliki kemampuan tinggi, merekalah yang akan memimpin memajukan bangsa dan negara. Mereka menolak sistem keturunan, sebab yang terpenting adalah pendidikan atau kemampuan. Bukan bangsawan daerah yang mereka akui, melainkan karena otak dan kecakapan. Posisi rakyat dalam teori ini juga marjinal, sebab mereka hanya digunakan untuk membesarkan pengaruh mereka.

Kebangsaan *cap ningrat* maupun kebangsaan *cap intelek*, tidak sesuai dengan keinginan Hatta, karena keduanya memandang rendah rakyat, dan keduanya kurang mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Kebangsaan yang dicita-citakan Hatta adalah kebangsaan *cap rakyat*. Di samping itu, kebangsaan yang dianut Hatta bukanlah kebangsaan yang membenci bangsa lain. Semua bangsa hendaknya menjalin persaudaraan, tetapi tentu hal itu tidak mungkin terjelma selama kedudukan bangsa bertinggi-rendah, bila yang satu menjadi penjajah dan yang lain terjajah. Hubungan persaudaraan antar bangsa hanyalah bias terjalin bila kedua bangsa tersebut sederajat.

Jika dibandingkan dengan nasionalisme yang dianut Bung Karno, maka berbeda ceritanya. Nasionalisme Soekarno bersifat anti penjajahan dan anti imperialisme yang kemudian berkembang menjadi anti unsur-unsur Barat. Baginya nasionalisme yang tumbuh di Barat berbeda dengan nasionalisme Timur. Kalau di

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, p.222.

Barat, nasionalisme tersebut bercirikan komersialisme, kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Sedangkan nasionalisme Timur mempunyai ciri-ciri sebaliknya, anti kolonialisme dan anti Barat, sehingga tidak memungkinkan untuk berkerja sama dengan imperialisme Barat.<sup>23</sup>

Menurut Hatta, riwayat dunia cukup memberi bukti bahwa pada bangsa yang bergerak untuk kemerdekaannya, cita-cita internasionalisme kalah oleh semangat kebangsaan. Sebagai argumen Bung Hatta untuk mendukung pernyataan tersebut, ia menunjuk kepada ketidakberhasilan Partai Buruh di Inggris untuk menanam persaudaraan dengan orang-orang Irlandia. Hatta memandang bahwa cita-cita persatuan lekas timbul dari negeri Industri, dimana rakyatnya yang memburuh terlepas dari ikatan tanah dan tempat, melainkan disusun oleh pabrik dan disiplin kerja. Sebagai rujukan Bung Hatta dalam hal ini adalah negara Inggris yang merupakan negara Industri. Sedangkan rujukannya untuk negeri agraria yang lambat persatuannya adalah Italia. Kedudukan bangsa tidak ditentukan oleh bahasa yang sama, dan agama yang serupa, melainkan oleh kemauan untuk bersatu, dimana ada kemauan untuk bersatu dalam perikatan yang bernama bangsa, di situlah timbul kebangsaan.<sup>24</sup>

#### **F. Pandangan Hatta Tentang Politik Luar Negeri Indonesia.**

Politik luar negeri Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Hatta di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 2 September 1948, dan dalam pidatonya yang berjudul “*Mendayung di antara Dua Karang*”, selagi Indonesia sedang berada dalam awal pembangunan setelah sekian lama kemerdekaan penuh belum didapatkan. Peranan Bung Hatta juga diakui oleh Mochtar Kusumaatmaja, bahwa Bung Hatta-lah orang pertama sebagai peletak dasar politik luar negeri Indonesia.<sup>25</sup> Pernyataan Bung Hatta yang cukup menggelitik adalah mestikah kita bangsa Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan Negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tidak ada

---

<sup>23</sup> Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Gramedia, 1981, p.120.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Mochtar Kusumaatmaja, “Bung Hatta: Peletak Dasar Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam Idayu Press, *Bung Hatta Kita dalam Pandangan Masyarakat*. Jakarta, 1982, p.198.

pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita ?<sup>26</sup> Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Bung Hatta sendiri, bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah supaya bangsa Indonesia tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, Indonesia merdeka seluruhnya. Ini merupakan dasar yang fundamental daripada politik bebas Republik Indonesia.

Dasar perjuangan yang telah menjadi semboyan yaitu percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan sendiri. Tetapi bukan berarti menutup diri dari dunia luar. Bangsa Indonesia harus bias mengambil keuntungan dari situasi internasional untuk mencapai tujuan bangsa.<sup>27</sup>

Politik luar negeri yang kita kenal sekarang adalah bebas aktif, walau ketika Hatta memberikan penjelasan saat itu tidak pernah menyebut kata tersebut. Tetapi jika dilihat secara lebih teliti keterangan Bung Hatta tanggal 2 September 1948 yang berjudul “*Mendayung Di antara Dua Karang*” artinya tidak lain dari politik bebas aktif. *Mendayung* sama artinya dengan upaya aktif dan *antara dua karang* adalah tidak terikat oleh dua kekuatan adikuasa yang ada (bebas).<sup>28</sup>

Tujuan sesungguhnya adalah mencapai kemerdekaan Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, segala siasat ke dalam dan ke luar disusun untuk melaksanakan Indonesia tersebut. Sedangkan mengenai kedudukan Indonesia di dunia Internasional, kita harus pintar membaca situasi dunia. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan berada dalam posisi persimpangan dalam hubungan internasional.

Secara jelas dan sistematis tujuan politik luar negeri menurut Hatta pokok-pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
2. Memperoleh dari luar negeri barang-barang yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri.

---

<sup>26</sup> Mohammad Hatta, *Mendayung Di Antara Dua Karang*. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, p.12.

<sup>27</sup> M. Sabir, *Politik Bebas Aktif*. Jakarta: Masagung, 1987, p. 15.

<sup>28</sup> Mohammad Hatta, *Dasar Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1953, p.14.

3. Perdamaian internasional, karena hanya dalam damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
4. Persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan dari cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila menjadi dasar filsafat negara kita.

Jika kita ingin mencapai tujuan tersebut di atas maka kita harus membuat strategi yang jitu agar target di atas dapat kita capai dengan gemilang. Strategi tersebut bias diterima secara umum di dunia internasional, agar tahu itikad baik kita sebagai Negara yang baru merdeka. Sedangkan faktor-faktor yang menentukan politik luar negeri ada dua, yakni factor subyektif dan obyektif. Faktor-faktor itulah yang membedakan haluan politik luar negeri suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Faktor subjektif yang mempengaruhi yaitu keinginan suatu negeri atau perasaan simpati atau antipati dari para ahli negara-negara dan pemimpin Negara. Sedangkan factor objektif yang ikut menentukan yaitu, keadaan-keadaan yang nyata yang dihadapinya dan kedudukan geografinya serta dasar filsafat negara kita. Golongan partai politik manapun yang memegang kekuasaan Negara pada suatu waktu, ia tidak dapat menjalankan politik Negara yang menyimpang dari Pancasila itu.

Bung Hatta tidak pernah melepaskan keinginannya bahwa dalam masalah politik luar negeri Indonesia harus mempertahankan politik luar negeri yang bebas aktif. Boleh memihak mengenai masalah tertentu, pada waktu tertentu, tetapi tidak mengorbankan kemerdekaan dan kebebasannya menentukan pilihan untuk jangka panjang bagi kepentingan Negara manapun. Lebih lanjut Hatta menambahkan, bahwa bangsa Indonesia harus secara jitu menempatkan diri sebagai bangsa yang baru merdeka di tengah-tengah bangsa-bangsa di Dunia. Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan kemerdekaan dan perdamaian dunia. Bangsa Indonesia tidak perlu memasukkan dirinya dalam salah satu blok, tetapi bukan berarti menentang suatu blok.

#### **G. Pemikiran Hatta tentang Hak Asasi Manusia**

Membahas tentang Hak Asasi manusia (HAM), cukup pelik dan menarik. Lebih-lebih pada masa sekarang ini, HAM adalah tema pokok yang paling

sering diperdebatkan oleh dalam berbagai kesempatan oleh para pemimpin Negara dan dunia. Banyak bermunculan negara-negara yang merasa dirinya sebagai penegak HAM yang kemudian memaksakan standar HAM-nya kepada Negara lain sementara ia sendiri dengan seenaknya sendiri menuduh negara lain sebagai pelanggar HAM. Oleh sebab itu sebagai negara yang telah melanggar HAM tidak patut menerima kebaikan dan bantuan dalam bentuk apapun atau dikucilkan dari pergaulan dunia internasional, dan bahkan sering juga negara-negara tersebut diberi sanksi-sanksi yang terkadang irrasional. Bahkan lebih tragis dan dramatisnya lagi, dalam masalah apapun suatu negara yang ingin menjalin hubungan dengan Negara lain selalu dipersoalkan tentang pelaksanaan HAM dinegaranya.

Terdapat tiga negara yang dianggap sebagai peletak dasar hak asasi manusia (Ham) yaitu Inggris, Amerika Serikat dan Perancis. Inggris merupakan negara pertama yang secara giat memperjuangkan hak asasi manusia, seperti pada masa pemerintahan Raja John Lackland (1199-1216), yang memerintah secara sewenang-wenang. Para bangsawan tidak tahan dengan kesewenangan raja, kemudian mengadakan protes keras yang akhirnya melahirkan piagam “Magna Charta” tahun 1215. Dalam piagam tersebut untuk pertama kalinya muncul pengertian HAM walaupun dalam bentuk yang belum sempurna, bahkan dapat diartikan hanya merupakan hak darikaum bangsawan.

Sedangkan di Amerika Serikat, yang saat itu sebagai jajahan Inggris mendapat pengaruh gerakan ham di negara induk. Rakyat Amerika yang ingin mendapat kemerdekaan menyatakan deklarasi yang dikenal “Declaration of Independence” tanggal 4 Juli 1776. Deklarasi tidak sekedar mengumumkan kelahiran negara baru, tetapi juga mencetuskan falsafah kemerdekaan manusia. Ia tidak bersandarkan kepada keluhan-keluhan khusus, melainkan bersandar pada landasan kebebasan perseorangan.<sup>29</sup> Hal ini dilanjutkan dengan munculnya konsep HAM tanggal 27 Agustus 1789.

Dalam skala lebih besar, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional, tiga tahun setelah berdiri (1948) membentuk komisi HAM

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 1994, p.72.

dimana soal-soal hak sosial dan ekonomi diberi tempat di samping hak politik. Setelah bersidang dengan pembahasan matang tanggal 10 Desember 1948 menerima secara bulat hasil pekerjaan komisi berupa pernyataan sedunia tentang HAM atau sering disebut dengan *Declaration of Human Rights*<sup>30</sup>

UUD 1945 di Indonesia, seperti UUD lain di dunia juga mencantumkan masalah HAM. Walaupun UUD 1945 disusun sebelum adanya Declaration of Human Right, ternyata telah banyak mencantumkan HAM dalam beberapa pasal (7 pasal)<sup>31</sup>. Bung Hatta sebagai salah satu sosok yang gigih memperjuangkan HAM dalam penyusunan UUD 1945. Masalah HAM memang menjadi perdebatan dalam sidang-sidang pembahasan UUD. Soepomo yang menawarkan bentuk negara integralistik menganggap bahwa HAM tersebut dianggap berlebihan, dibayangkan berdampak negatif dan sebagai hak-hak perorangan selalu di bawah kepentingan bersama.<sup>32</sup> Pendapat Soepomo didukung oleh Soekarno yang menganggap bahwa individualistik inilah yang akan menimbulkan konflik di negara kita bila masalah tersebut dimasukkan dalam UUD.

Kiprah Bung Hatta yang paling menonjol untuk memperjuangkan HAM adalah usahanya yang gigih untuk memasukkan beberapa ketentuan HAM ke dalam UUD yang saat itu sedang disusun. Saat itu mayoritas peserta sidang tidak memperdulikan masalah HAM, karena menganggap bahwa masalah tersebut sangat berbau Barat yang selama itu seolah menjadi barang yang haram untuk ditiru. Soepomo yang menawarkan bentuk Negara yang integralistik menganggap bahwa HAM tersebut dianggap berlebihan, dibayangkan berdampak negative dan sebagai hak-hak perorangan selalu di bawah kepentingan bersama.<sup>33</sup> Pendapat Soepomo didukung oleh Soekarno yang menganggap bahwa hal individualistik inilah yang akan menimbulkan konflik dalam Negara bila masalah tersebut dimasukan ke dalam UUD.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> M. Ridwan Indra Ahadian, *Hak Azasi Manusia dalam UUD 1945*. Jakarta: Haji Mas Agung, 1991, p.14.

<sup>32</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Grafiti, 1995, p.92.

<sup>33</sup> Ahadian, *op.cit.*, p.8.



Hatta yang setelah sekian lama berkecimpung dalam pergerakan kemerdekaan dan mengasah otaknya dengan menulis di berbagai media masa, menganggap bahwa sangatlah penting untuk memasukkan hak-hak individu tersebut. Usul Bung Hatta mendapat dukungan dari Mohammad Yamin. Akhirnya karena usaha gigih Bung Hatta itulah kita memiliki pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Tanpa pasal 28 UUD 1945, yang didasarkan pada paham integralistik hanya akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara kekuasaan yang akan memberikan kepada para pemimpin, kekuasaan dengan asumsi para pemimpin adalah negarawan tanpa pamrih pribadi, suatu slogan yang lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan.<sup>34</sup>

Pada tulisan Hatta “Tuntut Kemerdekaan Pers” (1931) Bung Hatta menulis, “Kemerdekaan tiap-tiap orang berbicara menulis mencetak dan membentangkan pikirannya, sedangkan yang ditulisnya itu tidak guna diperiksa lebih dulu oleh yang berkuasa”.<sup>35</sup> Hal ini berhubungan dengan usulnya dalam sidang BPUPKI di mana Bung Hatta mengusulkan untuk memasukkan masalah tersebut yang kemudian kita kenal dengan pasal 28 UUD 1945.

Pada tanggal 4 Desember 1950, ketika Hatta berpidato pada sidang ketua panitia mengenai pekerjaan pada perkebunan daripada perburuhan internasional di Bandung yang berjudul Kaum Buruh dan Perdamaian Sosial, Hatta dengan tegas memaparkan hak buruh. Perlindungan buruh tidak saja didapat sebagai perlindungan bekerja dari bahaya dan kecelakaan, penetapan jam kerja dan upah minimum, tetapi juga sebagai jaminan sosial. Bukan hidup buruh sekarang saja yang dijamin, tetapi juga penghidupannya pada hari tuanya. Pemikiran ini berkaitan erat juga dengan masalah hak tenaga kerja dan juga kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran baik dengan lisan atau dengan tulisan.

Masalah lain yang diperjuangkan Bung Hatta dalam rangka penyusunan UUD 1945 adalah dengan keberhasilannya memasukkan perihal ekonomi dan kesejahteraan rakyat pada pasal 33 sebelum diamandemen yang berbunyi:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Mohammad Hatta, “Tuntut Kemerdekaan Pers”, dalam *Kumpulan Karangan Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, p.222.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari isi pasal 33 ini sangat terasa bahwa HAM dalam artian berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia cukup dijamin.<sup>36</sup> Dari sinilah kita dapat melihat keberhasilan Bung Hatta yang sangat memperhatikan rakyat, yang kemudian terwujud dalam UUD 1945.

Jika kita kaitkan pasal 33 UUD 1945 dengan pasal 27 ayat 2 di mana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan kemudian dalam mukadimah, maka kesimpulan yang tidak boleh tidak, adalah bahwa pemerintah wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya.<sup>37</sup> Hak untuk mendapat pekerjaan juga merupakan salah satu unsur HAM yang penting dalam kehidupan manusia.

Bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah hidup dari pertanian, Bung Hatta menaruh perhatian yang cukup besar. Maka ketika pada jaman Jepang ia menulis Soal Hak Tanah yang diberikan sebagai dasar Prae Advis kepada Panitia Penyelidik Adat Istiadat dan Tata Usaha Lama pada tahun 1943.<sup>38</sup> Dalam usahanya kemudian tersirat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3.

Tanah adalah salah satu HAM yang nilainya menjadi teramat penting bagi sebuah negara agraris di Indonesia. Karena itu suatu pemerataan pemilikan tanah adalah hal yang mutlak. Pemerintah dengan segala kebijaksanaannya haruslah mengalah pada pemerataan pemilikan atas tanah ini.<sup>39</sup> Selama pemilikan tanah tidak merata, selama hak untuk memiliki diancam dan diinjak-injak, selama itu pula kita sukar bicara soal HAM. Pembangunan dengan segala keterbukaannya terhadap

---

p.18. <sup>36</sup> Todung Mulya Lubis, *Hak Azasi Manusia dan Kita*. Jakarta: Sinar Harapan, 1982,

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Mohammad Hatta, 1976, *op.cit.*, p.30.

<sup>39</sup> Lubis, *op.cit.*, p.25.

penanaman modal asing jangan hendaknya turut mengasingkan rakyat di tanahnya sendiri.<sup>40</sup>

Perhatian Bung Hatta juga tercurah pada hal-hal lain yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Mungkin saat itu tidak terdefinisi secara eksplisit bahwa masalah-masalah yang diperjuangkan oleh Bung Hatta adalah masalah HAM seperti sekarang sedang populer dibicarakan setiap orang, tetapi setelah dipelajari lebih mendalam maka nampak secara nyata bahwa tulisan-tulisan Bung Hatta dan perjuangannya memasukkan beberapa pasal yang melindungi hak-hak asasi manusia khususnya dan demi kepentingan seluruh rakyat pada umumnya.

Komitmennya tentang kedaulatan rakyat memang banyak tercermin dalam berbagai tulisan dan ucapannya sejak ia aktif dalam pergerakan nasional sampai wafatnya tahun 1980. Hatta tidak pernah menggembor-gemborkan tentang perjuangannya sebagai pembela hak-hak asasi manusia, namun tanpa propaganda yang meledak-ledak pun ia telah memperjuangkan hal tersebut baik dalam ucapan atau pun tindakannya. Dan rasanya tidaklah berlebihan apabila disimpulkan bahwa Bung Hatta adalah salah seorang pemimpin Indonesia menonjol yang memberikan perhatian perhatian nyata pada masalah hak-hak asasi manusia.

## **H. Penutup**

Membicarakan Bung Hatta tidak akan pernah habis untuk beberapa dekade, dan mungkin beberapa abad yang akan datang karena sangat kaya akan visi, gagasan, dan contoh-contoh konkret yang dialami oleh banyak orang. Dalam pribadinya nilai-nilai baik yang positif dari timur dan barat telah menyatu dalam format yang hampir sempurna. Tetapi pertanyaan yang masih merisaukan adalah: pandaikah atau lebih provokatif lagi, maukah kita belajar dari sosok negarawan moralis ini, yang lahir separuhnya dari rahim bangsa kita di sebuah kota kecil di tanah Minang pada 12 Agustus 1902?

Bung Hatta merupakan konseptor utama tentang kedaulatan rakyat. Rakyat adalah yang utama. Baik semasa pergerakan maupun sesudah kemerdekaan, rakyat menjadi titik sentral perjuangan Bung Hatta. Dengan pendidikan, rakyat harus dibuat

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

insaf akan harga dirinya. Sehingga ia bisa berpartisipasi dalam proses politik. Rakyat merupakan raja atas dirinya sendiri. Dengan berpegang pada prinsipnya tentang kedaulatan rakyat, maka pemikiran-pemikirannya kemudian selalu setuju pada rakyat seperti pada masalah kebangsaan dan perjuangannya kemudian dalam memasukkan hak-hak rakyat dalam UUD 1945.

Bung Hatta sampai akhir hayatnya merupakan tokoh yang konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Seperti yang dikatakan oleh Alfian dalam bukunya *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, Kumpulan Karangan, bahwa sikap dan tingkap laku Bung Hatta kelihatan sebagai pantulan langsung dari apa-apa yang sebenarnya menjadi buah pikirannya. Atau bisa dikatakan bahwa sikap dan tingkah laku Bung Hatta yang terlihat sebenarnya merupakan personifikasi dari pemikiran-pemikirannya. Apa yang mungkin kurang jelas disampaikan dalam bentuk karya tulisan atau pemikiran, hal itu akan lebih mudah dimengerti melalui sikap dan tingkah laku yang diperlihatkannya. Di samping berbagai julukan yang dimengerti melalui sikap dan tingkah laku yang diberikan kepada Bung Hatta dari seorang pahlawan Proklamator, Bapak Koperasi, negarawan, demokrat sejati, cendekiawan, atau satu lagi yang tidak bisa dilupakan, bahwa Bung Hatta adalah sebagai guru bangsa, sebagai pendidik negeri yang sejati, dalam politik, ekonomi, dan moral. Guru dalam teori dan praktik.

Kecintaannya pada rakyat yang diperjuangkannya dibuktikan sampai akhir hayatnya, dengan wasiatnya yang terakhir bahwa bila dipanggil oleh Yang Maha Kuasa ia ingin dikuburkan di tengah-tengah rakyat, yaitu di Tanah Kusir yang merupakan tempat peristirahatan terakhir Bung Hatta. Kepergiannya merupakan duka yang amat mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **Kepustakaan**

Adnan Buyung Nasution, 1995. *Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Grafiti.

A.H. Nasution, 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I*. Bandung: Disjarah Angkatan darat dan Angkasa.

- Ahmad Syafii Maarif, 1987. *Islam dan Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Ahmad Syafii Maarif, 1999. *Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Perpustakaan Hatta.
- Ahmad Syafii Maarif, 1996. *Demokrasi dan Nasionalisme Pengalaman Indonesia*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Alfian, 1992. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Politik*. Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Alfian, 1981. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Gramedia.
- Bambang Sunggono, 1994. *Bantuan hokum dan hak Azasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Deliar Noer, 1990. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Hans J. Mongenthau, 1990. *Politik Antar Bangsa Edisi ke-6*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Mohammad Hatta, 1948. *Mendayung Di Antara Dua Karang*. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia.
- Mohammad Hatta, 1953. *Kumpulan Karangan Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mohammad Hatta, 1953. *Dasar Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- Mohammad Hatta, 1960. "Demokrasi Kita", dalam *Panji Masyarakat*. No.22, 1 Mei 1960.
- Mohammad Hatta, 1977. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press.
- Mohammad Hatta, 1978. *Memoir*. Jakarta: Tintamas.
- Mohammad Hatta. 1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Idayu Press
- Mohammad Hatta, 1972. *Portrait of Patriot*. Alih bahasa Deliar Noer. The Hauge Paris: Mouton Publishers.
- Mohammad Hatta, 1977. *Menuju Negara Hukum*. Jakarta: Idayu Pres.
- Mohammad Hatta, 1983. *Kumpulan Pidato II*. Jakarta: Idayu Press.

Mochtar Lubis, 1980. "Bung Hatta Manusia Berdisiplin", dalam Meutia Farida Swasono (ed), *Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan*. Jakarta: Sinar Harapan dan Universitas Indonesia.

Mochtar Kusumaatmaja, 1982. "Bung Hatta: Peletak Dasar Politik Luar Negeri Indonesia", dalam Idayu Press, *Bung Hatta Kita dalam Pandangan Masyarakat*.

M. Sabir, 1987. *Politik Bebas Aktif*. Jakarta: Masagung.

M. ridwan Ahadin, 1991. *Hak Azasi Manusia dalam UUD 1945*. Jakarta: Haji Masagung.

Soebagiyo, 1972. *Bung Hatta Kita*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70.

Todung Mulya Lubis, 1982. *Hak Azasi Manusia dan Kita*. Jakarta: Sinar Harapan.

**Tentang Penulis:**

Aman, M.Pd. Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Menamatkan Program S-1 pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 1999, dan Menyelesaikan Program Pascasarjana S-2 Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta Tahun 2002.